

PENULISAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN UMUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH PRAJURIT TNI**



Diajukan oleh :

MUHAMMAD ARSYANDHA NERZA AKBAR

NPM : 210514100

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN UMUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH PRAJURIT TNI



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ARSYANDHA NERZA AKBAR

NPM : 210514100

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal, 21 Januari 2026

Dosen Pembimbing,

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN UMUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH PRAJURIT TNI



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Januari 2026
Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt. II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anna Christiani, S.H, M.,Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberi kekuatan dan kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Kewenangan Peradilan Militer dan Peradilan Umum Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Prajurit TNI”** ini dengan lancar. Penulisan ini dilakukan penulis sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan doa dari pihak-pihak yang selalu membantu penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing dari penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta atas dedikasi tingginya untuk memberikan ilmu-ilmu hukum kepada penulis yang kelak akan sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.
4. Seluruh Staff dan Karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu segala keperluan administrasi perkuliahan penulis.
5. Seluruh bapak penjaga parkir Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang sesekali menjadi teman berbicara penulis.

6. Joko Sulistyio Dewobroto dan Myke Hendrawati Ari Suharno, S.E. selaku orang tua dari penulis yang selalu memberikan bantuan secara materiil dan imateriil ataupun terhadap jasmani dan rohani bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini.
7. Stella Zahra Aldiandra Dewani selaku adik perempuan dari penulis yang selalu membantu dan memberikan nasihat kepada penulis dalam perkuliahan maupun penulisan skripsi ini.
8. Sheravian Adinda selaku teman, sahabat, dan kekasih tercinta yang selalu memberikan nasihat, masukan, serta bantuan dalam kehidupan saya serta penulisan skripsi ini.
9. Shallomitha Herwidya Denova dan anak-anak bawah pohon (Undertrees Famiglia) Bayu Satriya Negara, Raden Michael Bagus Pacu, Reinardus Mario Rosario , Aloysius Raditya Arga Kusuma, Bernadus Kristian Arya Putra, Elwas Raka Putranta, dan Rafael Satria Perdana Widyatma atas solidaritas dan dukungannya selama masa perkuliahan.
10. Gabriel Reza Adhyasta Wardhana dan Andreas Prabu Maheswara Syiwanata, yang selalu menemani penulis memancing saat penulis sedang banyak pikiran.
11. Keluarga besar Asthabrata Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap agar kelak bantuan dari pihak-pihak tersebut akan dibalas oleh murah kasih Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian kata pengantar dari penulis yang jauh dari kata sempurna, penulis berharap supaya penulisan ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan bangsa, dan negara.

Sleman, 17 Desember 2025

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'M' and 'A' with a long horizontal stroke extending to the right.

Muhammad Arsyandha Nerza Akbar

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that causes significant losses to state finances and undermines the principles of law enforcement. Problems arise when corruption is committed by members of the Indonesian National Armed Forces (Tentara Nasional Indonesia/TNI), due to differences in the regulation of jurisdiction between the Military Court and the General Court. Law Number 31 of 1997 on Military Courts determines jurisdiction based on the status of the perpetrator, while legislation on corruption eradication affirms that corruption falls under the jurisdiction of the Corruption Court within the General Court system. This study aims to analyze the authority of the Military Court and the General Court in handling corruption offenses committed by TNI personnel, as well as the legal implications arising from overlapping jurisdictions. The research method employed is normative legal research using a statutory approach. The results indicate inconsistencies in legal norms that create legal uncertainty and potentially violate the principle of equality before the law. Therefore, harmonization and reform of legislation are necessary to ensure legal certainty and justice in the handling of corruption offenses committed by TNI personnel.

Keywords: *Military Court, General Court, Corruption, TNI Personnel, Judicial Authority.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
BAB II PEMBAHASAN	19
A. Tinjauan tentang Kewenangan Peradilan Militer	19
1. Pengertian Peradilan Militer.....	19
2. Kewenangan Peradilan Militer	22
3. Pengertian Prajurit TNI	24
4. Tugas Prajurit TNI.....	25
B. Tinjauan tentang Kewenangan Peradilan Tipikor	29

1. Pengertian Peradilan Tipikor	29
2. Kewenangan Peradilan Tipikor	31
3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	33
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	34
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	37
C. Kewenangan Peradilan Militer dan Peradilan Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Prajurit TNI	41
1. Kewenangan Peradilan Militer Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Prajurit TNI	41
2. Kewenangan Peradilan Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Prajurit TNI	47
D. Implikasi Hukum Akibat Tumpang Tindih Kewenangan antara Peradilan Militer dan Peradilan Umum dalam Kasus Korupsi Prajurit TNI	60
BAB III PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan hasil dari duplikasi ataupun plagiasi karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan,atau sanksi hukum yang berlaku.

Sleman, 17 Desember 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Muhammad Arsyandha Nerza Akbar